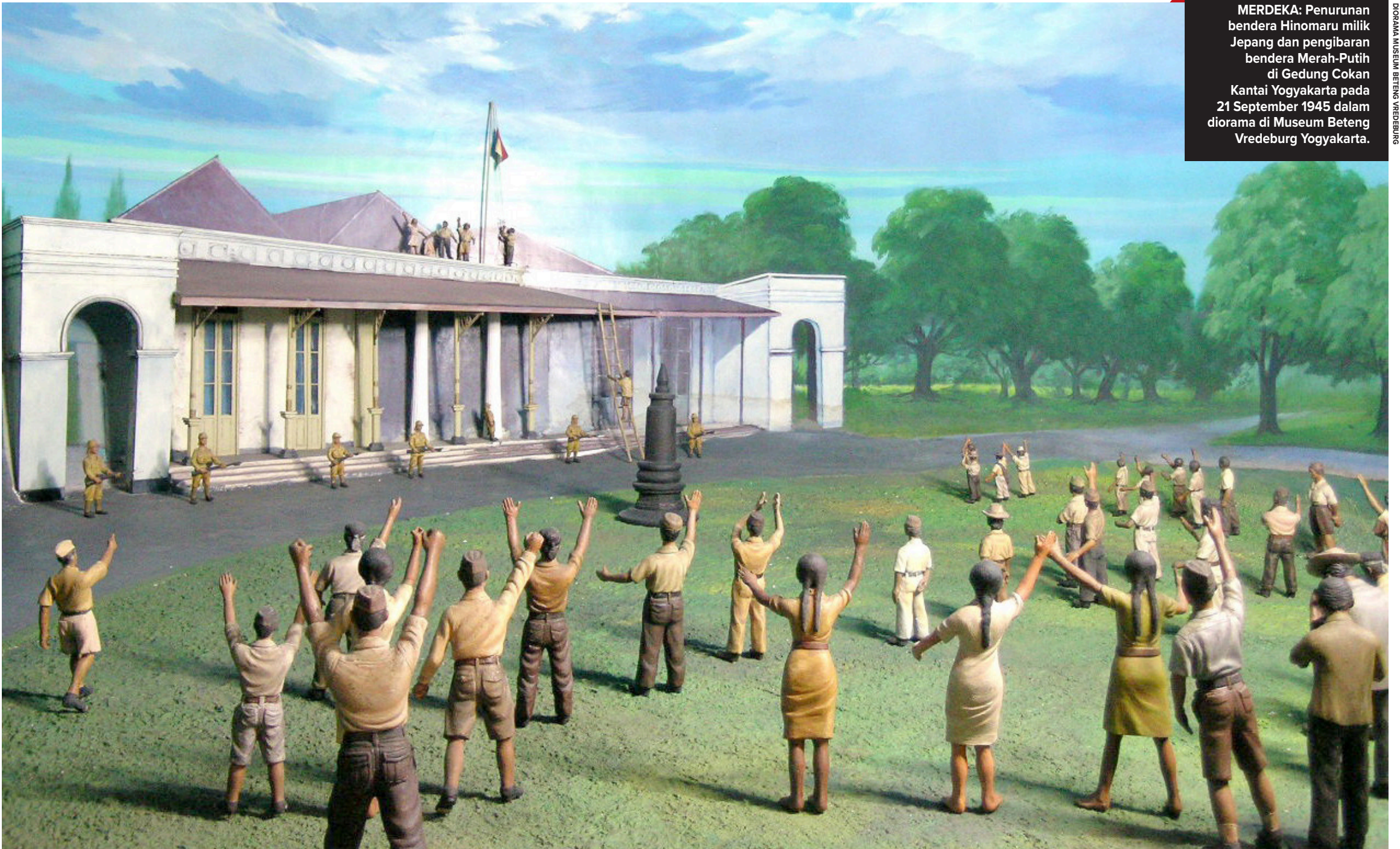




MERDEKA: Penurunan bendera Hinomaru milik Jepang dan pengibaran bendera Merah-Putih di Gedung Cokan Kantai Yogyakarta pada 21 September 1945 dalam diorama di Museum Beteng Vredeburg Yogyakarta.



PENURUNAN BENDERA JEPANG DI GEDUNG COKAN KANTAI

Tak Gentar Kibarkan Sang Merah-Putih

Kominten rakyat Yogyakarta terhadap Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sangat kuat. Rakyat Yogyakarta berjuang untuk memastikan Indonesia tetap merdeka dan bendera Merah-Putih tetap berkibar.

PADA 21 September 1945, di Yogyakarta terjadi peristiwa istimewa. Sekitar sebulan berselang dari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan Soekarno dan Moh Hatta di Jakarta pada 17 Agustus 1945, di Yogyakarta bendera Merah-Putih berhasil dikibarkan di Gedung Cokan Kantai atau Gedung Agung Istana Negara Yogyakarta.

Sebelum peristiwa penurunan bendera Jepang untuk diganti bendera Indonesia, pernah ada delegasi Indonesia menemui pihak Jepang di Gedung Cokan Kantai. Delegasi Indonesia meminta bendera Hinomaru (bendera Jepang) diturunkan dan digantikan dengan Merah-Putih. Permintaan itu dikabulkan pihak Jepang.

Namun, sikap Jepang itu hanya sesaat. Beberapa waktu kemudian, Jepang kembali menaikan bendera Hinomaru. Bendera Merah-Putih diturunkan.

Sikap Jepang ini memicu amarah rakyat Indonesia. Terutama rakyat yang berada di wilayah Yogyakarta.

Sehari sebelum peristiwa pengibaran Merah-Putih di Gedung Cokan Kantai, 20 September 1945, di Jakarta diselenggarakan konferensi yang

dihadiri tokoh masyarakat, pegawai, polisi, Badan Keamanan Rakyat, dan Barisan Pelopor dari berbagai daerah di Jawa. Konferensi tersebut dimaksudkan untuk menyatukan dukungan dan tekad untuk Republik Indonesia. Salah satu poin dari konferensi tersebut adalah pentingnya pemasangan bendera Merah-Putih di seluruh wilayah Indonesia.

Informasi terkait pemasangan bendera Merah-Putih itu segera di dengar oleh rakyat Yogyakarta. Mereka segera melakukan gerakan. Dimotori para pemuda, bendera Merah-Putih dikibarkan di rumah-rumah. Merah-Putih juga dikibarkan di bangunan toko, gedung pemerintah, dan pabrik. Bahkan, Merah-Putih juga dikibarkan di kendaraan.

Rakyat Yogyakarta juga bertekad mengibarkan Merah-Putih di Cokan Kantai untuk menggantikan bendera Hinomaru. Pada 21 September 1945, rakyat Yogyakarta menuju Balai Mataram atau juga dikenal sebagai Gedung Senisono. Tepatnya, di sebelah selatan Cokan Kantai Gedung Agung. Mereka berniat mengibarkan Merah-Putih di Balai Mataram.

Tentara penjajah Jepang berusaha mencegah. Tentara Jepang berusaha menghalau rakyat Yogyakarta yang berkumpul di Balai Mataram.

Rakyat Yogyakarta tak gentar. Tekad mengibarkan Merah-Putih di Cokan Kantai Gedung Agung tetap membara. Sekitar pukul 12.00, mereka kembali ke Balai Mataram dan langsung menuju Cokan Kantai Gedung Agung. Kali ini jumlah rakyat yang datang lebih banyak.

Ribuan rakyat Yogyakarta berkumpul di Cokan Kantai Gedung Agung. Sebagian besar adalah pemuda pelajar. Mereka dikawal pasukan Polisi Istimewa.

Bertindak sebagai juru bicara yakni Jamaludin Nasution. Dia merupakan sekretaris Promotor Pemuda Nasional (PPN). Mereka ingin menurunkan bendera Hinomaru milik Jepang yang berada di atas atap Cokan Kantai. Mereka ingin mengganti dengan bendera Merah-Putih.

Beberapa pemuda maju ke depan. Mereka masuk ke kompleks Cokan Kantai.

Sejumlah pemuda berusaha naik ke atap gedung Cokan Kantai. Mereka antara lain Slamet, Sutan Ilyas, Supardi, Samawi, dan Rusli. Ada pula pemuda bernama Siti Ngaisah.

Mereka berhasil. Bendera Hinomaru milik Jepang diturunkan. Mereka segera menggantikannya dengan bendera Merah-Putih milik Republik Indonesia. Lagu *Indonesia Raya* pun dinyanyikan dengan penuh khidmat.

Berkibarnya Merah-Putih di gedung Cokan Kantai disambut bahagia. Ribuan rakyat Yogyakarta melakukan pawai menyusuri Jalan Malioboro. Pawai ini melibatkan satuan Polisi Istimewa yang berpawai dengan membawa senjata lengkap.

Hari itu pula diselenggarakan ikrar. Kesatuan Polisi Istimewa Yogyakarta di Asrama Polisi Pathuk, dipimpin R.P. Sudarsono mengadakan ikrar dan ketetapan hati untuk hanya melaksanakan perintah dari Sultan Hamengku Buwono IX sebagai pucuk pimpinan di Yogyakarta. (*/amd/fj)



TANGGUNG JAWAB: Sri Sultan Hamengku Buwono IX bersama Presiden Soekarno di Siti Hinggil Keraton Jogja.

Komando di Tangan Sultan HB IX

AMANAT 5 September 1945 yang dinyatakan Raja Keraton Jogja Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Pakualaman Sri Paduka Paku Alam VIII dikeluarkan saat tentara Jepang masih berada di Indonesia. Termasuk di Yogyakarta.

Di Yogyakarta, tentara Jepang tersebar di sejumlah tangsi dan sekitarnya. Mereka memiliki senjata lengkap.

Sultan HB IX sangat memperhitungkan kondisi Yogyakarta saat mengeluarkan Amanat 5 September yang menegaskan Yogyakarta merupakan daerah istimewa di bawah Republik Indonesia tersebut. Beliau memperhitungkan dengan cermat banyak aspek.

Sultan HB IX tidak memaksa Jepang meninggalkan Yogyakarta. Meski, tentara Jepang masih menduduki pos-pos pemerintahan di Yogyakarta.

Sultan HB IX lebih mengkhawatirkan ancaman yang sangat potensial yang datang dari pihak penjajah Belanda. Beliau menduga tentara Belanda akan kembali datang di Yogyakarta.

Amanat 5 September tersebut dapat disebut sebagai gerakan terbuka perta-

ma kali terhadap pemerintah tentara Jepang di Yogyakarta. Sekaligus, menjadi isyarat bagi rakyat Yogyakarta untuk bergerak.

Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman segera menyesuaikan diri. Sistem kerajaan tradisional diubah menjadi sistem pemerintahan demokratis. Perubahan ini dilandasi sikap terbuka Sultan HB IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Hal tersebut disambut hangat rakyat Yogyakarta.

Peristiwa pertama yang terjadi setelah Amanat 5 September 1945 tersebut adalah penurunan bendera Jepang dan penaikan bendera Merah-Putih di Cokan Kantai. Peristiwa tersebut terjadi pada 21 September 1945.

Gerakan rakyat kian kuat. Pusat Pimpinan Keamanan yang berkantor di Kepatihan pun diserahkan ke Komite Nasional Indonesia (KNI) dan berada di bawah kendali Sultan HB IX. Penunjukan Sultan HB IX sebagai pimpinan itu ditujukan agar koordinasi dan komando terkait ketertiban berada dalam satu tangan. (*/amd/fj)

Semangat Guyub-rukun dan Kerja-bersama

ISTANA Presiden Gedung Agung Yogyakarta selalu menjadi tempat Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi DIY. Pada Peringatan Ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2019 lalu, bertindak sebagai inspektur upacara adalah Gubernur DIY Hamengku Buwono X.

Dalam sambutannya Hamengku Buwono X menyatakan, hingga detik ini darah pahlawan telah banyak tertumpah, ribuan nyawa melayang, tak terbilang tulang belulang betebaran menghiasi Bumi Pertiwi. Harga mahal yang harus dibayar. Demi kemerdekaan bangsa, mewujudkan hanya satu kata, Merdeka! Kusuma bangsa yang gugur itu, bukan sari satu suku, satu agama, satu golongan. Tapi, dari seluruh elemen bangsa, tanpa kecuali!

Perjuangan pemimpin lintas-etnik dan lintas iman itu, juga bukan milik Yogyakarta semata. Tetapi, juga dari

seluruh pelosok Nusantara.

Hamengku Buwono X menegaskan, di era digital ini hal yang diminta adalah etos kerja kreatif-inovatif didukung oleh disiplin. Selain itu, keuletan bekerja dan belajar serta berbagi jika kita hendak berperan dalam kemajuan dunia. "Guna mewujudkan, kita harus mengambil nilai-nilai progresif untuk berebut ilmu, teknologi, dan ekonomi di universitas, bank, dan industri," ungkapnya.

Sebagai bangsa, Indonesia harus bias keluar dari kebiasaan hanya menengok ke belakang. Tetapi, hendaknya lebih berorientasi ke depan. Sehingga, bisa membangun generasi baru yang mampu menapaki tegalan berbatu mendaki bukit keberhasilan di mana Indonesia bisa setara negara-negara maju.

Untuk itu, bangsa ini harus menumbuhkan kultur baru. Yakni, *culture of excellence* (kultur keunggulan) di semua bidang kehidupan, dimulai dari arena



PATRIOT: Gubernur DIY Hamengku Buwono saat menjadi inspektur upacara Peringatan K2-74 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi DIY di Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta pada 17 Agustus 2019.

pendidikan. Tema keunggulan sangat menentukan tingkat kemajuan dan martabat bangsa, yang digerakkan oleh visi akbar yang sanggup memin-

ta pengorbanan dari segenap warga. Basis keunggulan suatu produk, organisasi, daerah, bahkan bangsa, nyata-nyata dan tak bisa lain, ialah

manusia-manusia unggul, baik spiritualitas, intelektualitas, dan etos kerjanya. "Apa rahasianya? Jawabannya tegas: budaya! Budaya yang bertumbuh ialah kerja keras, disiplin, berhemat, dan mengutamakan pendidikan.

Memang, *spirit of excellence* perlu diberi darah, saraf, otot, dan daging agar menjadi tubuh. Artinya, menjadikannya sebuah budaya. Sekaranglah saatnya untuk bangkit bersama dalam Gerakan Kebudayaan untuk memberikan makna nyata *Renaissance Yogyakarta* menuju peradaban maju dan bermartabat.

"Marilah energi itu kita sinergikan, agar menjadi kekuatan dahsyat sebagai wahana menuju kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan dalam suasana gotong-royong *guyub-rukun* dan aman-damai," tegas Hamengku Buwono X.

Suasana *guyub-rukun* dan kerja-bersama itu telah diteladankan oleh para pendiri bangsa tatkala berjuang

bersama di Republik Indonesia antara tahun 1945-1949. Pada masa itu, jiwa kebangsaan membakar dada setiap pemimpin yang menyatu dengan rakyat, realitas dari filosofi *Manunggaling Kawula Gusti*.

Ketika itu pula, cara berjuang yang ber-Pancasila disemaikan dan diwujudkan dalam semangat *Bhinneka Tunggal Ika*. Karena, digerakkan oleh pemimpin lintas-etnik dan lintas-agama bahwa Yogyakarta tonggak awal pergaulan sebagai bangsa merdeka dipancangkan.

Artinya, perjuangan para pemimpin itu bukanlah untuk Yogyakarta semata. Tetapi, dari Yogyakarta untuk Indonesia. Jika dulu berjuang mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan maka di alam reformasi sekarang ini harus tetap berjuang agar bangsa ini dapat hidup terhormat dalam kemajuan, kesejahteraan, dan keadilan. (*/amd/fj)